**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Edy Ikhsan dkk, 2002, Pendidikan Hak Anak, Buku Panduan Guru, Medan: diterbitkan oleh PKPA

Humana-Save The Children, 1998, Anak Jalanan di Indonesia, Jakarta

ILO, 2004, Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai,Sumatera Utara, Sebuah Kajian Cepat, Jakarta : ILO

Iman Jauhari,SH, MH, 2003, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa

Inter Parlementary Union, 2006, Perlindungan Anak:Sebuah Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta

Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia (JARAK), 2002, Bagaimana Membuat Suara Kita Terdengar, Jawa Timur : Progressia Vol VI No.02 Desember 2002

Kelompok Kerja Pengkajian dan Pengembangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2005, Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Anak, Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010, Pedoman Advokasi Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Bidang Kesehatan, Jakarta : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2011 Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan, Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2012, Seluk Beluk Hak-Hak Anak, Jakarta

Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 2008, Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman (Kumpulan Catatan Pengalaman), Bandung : Penerbit LAHA

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2006, Bagian Pendidikan Kelautan Coremap II, Panduan Pendidikan Pasca Bencana Bagi Anak-Anak Pesisir, Jakarta : Diterbitkan oleh LIPI

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim, 2011, Membangun Perspektif Pengarusutamaan Hak Anak, Surabaya : LPA Jatim

Mhd Jailani, S.Sos,M.A, 2014, Praktek-Praktek Menjanjikan Pendidikan Sebaya, Medan : KKSP-Terre des Hommes

Mohammad Saroni, 2019, Pendidikan Karakter Tanpa Kekerasan : Upaya Membentuk Karakter Bangsa Yang Lebih Baik, Yogyakarta: Penerbit: Ar-Ruzz Media

Otokritik Akuntabilitas Internal Governance LSM, 2014, Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil Edisi 2, Februari-Juni 2014, Jakarta

PKPA, 2002, Pendidikan Hak Anak, Buku Panduan Guru, Medan: Diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

PKWJ UI-Magenta LR&A, 2014, Buku Saku : Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan, Jakarta

Pusaka Indonesia, 2014, Aturan Pelaksana UU SPPA Lambat, Anak Bukan Untuk Di Penjara, Pledoi Edisi II/2014, Medan :Diterbitkan Oleh Yayasan Pusaka Indonesia

Pusaka Indonesia, 2014, Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat, Studi di 6 Kota di Indonesia, Medan : USAID-Pusaka Indonesia

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), 2015, Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Anak Edisi Revisi ke-3, Medan

The Asia Foundation-Samin, 2020, Inklusi Bukan Ilusi : Pembelajaran di Lima Kota, Yogyakarta :diterbitkan oleh Yayasan Samin

The Asia Foundation-Yayasan Samin, 2020, Situasi Anak Yang Dilacurkan dan Pembelajaran Inklusi Sosial, Yogyakarta : Diterbitkan oleh Yayasan Samin

Unicef, 2004, Pengertian Konvensi Hak Anak, Percetakan Harapan Prima, Jakarta : Unicef

Unicef, 2010, Aku Anak Dunia (Bacaan Hak-Hak Anak Bagi Anak), Jakarta :Penerbit Yayasan Aulia

Unicef, 2014, Hentikan Kekerasan Pada Anak, Mataram : Penerbit LPA NTB

Unicef, 2015, Dunia Yang Layak Bagi Anak-Anak, Jakarta

Yayasan Pusaka Indonesia, 2002, Buku Saku Pendampingan Bagi Anak Jalanan Yang Berkonflik Dengan Hukum, Medan :Diterbitkan Oleh Yayasan Pusaka Indonesia

**PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU No.19 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.36 / 1990, tertanggal 25 Agustus 1990

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

1. **INTERNET**

Ahmad Masaul Khoiri “ Jumlah Ormas di Indonesia Lebih Dari 250 Ribu, detiknews. Jakarta, diakses Selasa, 12 Januari 2021

Annisa Nur Fitri dkk, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Hak Anak, Jakarta, Artikel diakses Rabu, 10 Februari 2021

Ari Ganjar Herdiansah, Randi, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, Bandung 2017, diakses Jum’at, 15 Januari 2021

Eka Yoana Ayuningtyas, Implementasi Hak Anak Dalam Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, diakses Rabu, 3 Februari 2021

Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun, diterbitkan oleh Cakrawala, Vol X, No.2 Desember 2015, diakses Senin, 15 Februari 2021

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Kelima (2 Juli 2017 -1 Juli 2018) UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas, Jakarta, 2018, diakses Minggu, 17 Januari 2021

Lenny N Rosalin, Sosialisasi Kebijakan PP dan PA Melalui Bakohumas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta 21 Februari 2011, diakses Selasa, 2 Februari 2021

Nur Endah Januarti, Integrasi Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Social Organization) di Lingkungan Sekolah, Fisip UNY, Yogyakarta,hal 1,diakses Selasa, 19 Januari 2021

OK Syahputra Harianda, Disampaikan pada workshop Pemenuhan Hak-Hak Anak :Peran Masyarakat dan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Anak, Medan, 2015, diakses Selasa, 19 Januari 2021

Otho H Hadi, Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi, Departemen Sosial Fisip UI, Makara-Sosial Humaniora Vol 14 tahun 2010, Jakarta, diakses Jum’at, 26 Februari 2021

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 2 Nomor 2, Juli-Desember 2016, diakses Jum’at, 12 Februari 2021

Sheilla Chairunnisyah Sirait, Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, De Lega Lata Vol 2,Nomor1 Januari-Juni 2017, diakses Jum’at, 12 Maret 2021

Tery Lewis, Handbook Manajemen Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil, Lingkar LSM,diakses Rabu, 20 Januari 2021

Yasmin Anwar Putri dkk, Program Kesejahteraan Sosial Anak Dalam memenuhi Kesejahteraan Anak Jalanan, Prosiding KS:Riset&PKM, Vol 2 Nomor 1, hal 146, diakses Rabu, 17 Februari 2021

Yayasan Pusaka Indonesia, Peran Masyarakat dan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Anak, Materi Presentasi disampaikan di Workshop Kesejahteraan Anak, Medan, diakses Minggu, 24 Januari 2021

Yayasan Pusaka Indonesia, Standard Operasional Prosedur, Medan, 2018, diakses Minggu, 28 Februari 2021